



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG

Haryono¹, Budiyo², Istyarini³, Wardi⁴, Apri Ardiantoro⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Semarang Indonesia
Email: fransharyono@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dikaji berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Kebijakan otonomi daerah berdampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Upaya standardisasi mutu harus menjadi fokus perhatian dalam upaya menjaga mutu pendidikan secara nasional. Sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia beroperasi dalam suatu sistem manajemen pendidikan dan pemerintahan yang mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab implementasinya kepada propinsi, kabupaten, yayasan dan sekolah/madrasah. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan dari BSNP. sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang berkaitan dengan tiga aspek utama yaitu: (1) Pengkajian konsep Penjaminan Mutu Pendidikan, (2) Pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang efektif untuk pengelolaan, pengambilan keputusan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, dan (3) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan berkelanjutan melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk melangkah ke proses penjaminan mutu pendidikan.

Kata Kunci : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang

dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di

seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pada tanggal 25 September 2009 yang lalu, pemerintah melalui Mendiknas telah menerbitkan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *Quality Assurance* atau penjaminan mutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Propinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama.

Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pelaksanaan SPMP telah dimulai pada tahun 2009. SPMP disusun oleh Depdiknas untuk mendukung komitmen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. SPMP disusun setelah dilaksanakannya review terhadap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Perberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) pada tahun 2007. Dengan SPMP, personil dari Kantor Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta pengawas sekolah akan memiliki peranan penting dalam menilai mutu sekolah dan mutu tenaga kependidikan sekolah. Mereka akan mengacu pada informasi penjaminan mutu dalam rangka membantu kabupaten/kota, sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu hasil pendidikan siswa. Strategi utama penjaminan mutu dalam SPMP di tingkat Kabupaten/Kota mencakup MSPK, Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). Strategi-strategi tersebut akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) belum tersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan.

Hasil riset menunjukkan bahwa sekolah dan madrasah merupakan pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap

proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan masyarakat, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Oleh karena itu, sekolah dan madrasah perlu diberdayakan dan didukung dalam usahanya menciptakan budaya mutu. Pihak masyarakat perlu didorong agar secara aktif mendukung program sekolah dan madrasah. Adapun pihak pemerintah daerah perlu ditingkatkan upaya koordinasinya agar mereka menyusun program dan penganggaran penjaminan mutu sebagai prioritas utamanya.

Untuk mencapai mutu, ternyata tidak setiap satuan pendidikan mampu melakukannya, khususnya di Sekolah Dasar Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Banyak faktor yang menjadi kendala dan penghambat sehingga mereka tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian secara mendalam, salah satu sebabnya adalah karena budaya penjaminan mutu di satuan pendidikan relatif sangat lemah. Secara operasional, jika ingin membina budaya penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan maka dipandang perlu memberi petunjuk atau panduan pencapaian mutu yang lebih rinci yaitu berdasarkan pada pencapaian setiap komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP).

METODE

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Workshop Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. 2) Memberikan pendampingan kepada Sekolah Dasar di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang untuk melakukan simulasi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini diwujudkan dalam serangkaian rencana penanganan masalah secara bersama yaitu:

Tahap persiapan

Tahap pertama menjalin koordinasi dengan pihak UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tahap kedua menyusun rencana kerja, tahap ketiga mengumpulkan peserta sasaran workshop, tahap empat pemberian pengarahan kepada peserta workshop.

Tahap pelaksanaan

Tahap pertama pemberian bahan workshop oleh tim pengabdian kepada masyarakat berupa materi dan jadwal pelaksanaan workshop, tahap kedua setelah persiapan sudah lengkap, tahap berikutnya adalah memberikan materi serta pendampingan dalam workshop.

Tahap Evaluasi

Untuk program pengabdian kepada masyarakat ini evaluasi program dilaksanakan dalam dua bagian, yaitu : Tahap pertama evaluasi proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan pada saat proses workshop yang berlangsung dari keseluruhan program. Tahap kedua evaluasi pendampingan, dilakukan terhadap pencapaian dari hasil kerja peserta dalam mengikuti kegiatan workshop, dari keseluruhan program

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk workshop “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang” diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Setelah kegiatan workshop tim pengabdian mempunyai target dan luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut : 1) Hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan dalam rangka mengetahui bagaimana keadaan dan hubungan berbagai dimensi dan aspek yang dijadikan fokus penilaian. 2) Hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan di sekolah. 3) Hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di

sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

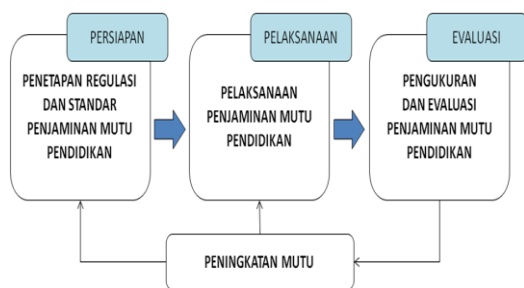
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, tempat di Sekolah Dasar Negeri Sampangan 2 jalan Menoreh Tengah X/9 Gajahmungkur Kota Semarang. Kegiatan ini dalam bentuk workshop sistem penjaminan mutu pendidikan yang melibatkan UPTD Pendidikan, kepala sekolah untuk Sekolah Dasar dan perwakilan guru di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Sekolah Dasar di kecamatan Gunungpati sejumlah 21 Sekolah Dasar, untuk Sekolah Dasar Negeri sejumlah 14 dan Sekolah Dasar Swasta sejumlah 7.



Gambar 1. Pembukaan Workshop SPMP

Paradigma baru sistem manajemen pendidikan yang berorientasi mutu mengenal empat buah prinsip, yaitu (1) prinsip otonomi; (2) prinsip evaluasi; (3) prinsip akuntabilitas, dan (4) prinsip akreditasi. Paradigma baru sistem pendidikan tersebut dapat digunakan untuk semua lapis otoritas satuan pendidikan, seperti wewenang untuk *self regulation* pada prinsip otonomi dapat diterapkan pada lapis organisasi institusi satuan sekolah dan kelas.

Pemecahan masalah penjaminan mutu pendidikan divisualisasikan sebagai berikut.



Gambar 1: Pemecahan masalah penjaminan mutu pendidikan

Paradigma baru sistem pendidikan tersebut dapat digunakan untuk semua lapis otoritas satuan pendidikan, seperti wewenang untuk *self regulation* pada prinsip otonomi dapat diterapkan pada lapis organisasi institusi satuan sekolah dan kelas. Namun harus selalu diingat bahwa dibalik otonomi ada akuntabilitas, dan penilaian kualitas dalam bentuk akreditasi. Akuntabilitas dalam *self regulation* ini mengisyaratkan tugas untuk melakukan perencanaan terhadap peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Bentuk akuntabilitas pada otoritas sekolah kepada otoritas pusat atau bisa juga yayasan yang dikenal dengan penjaminan mutu internal (*internal quality assurance*). Upaya penjaminan mutu ini berupa pemberdayaan lapis unit akademik untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan berdasar pada perencanaan berbasis pada fakta yang diperoleh berdasar pada proses evaluasi diri. Dalam sistem penjaminan mutu internal bidang akademik diupayakan untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada setiap unit akademik yang mengandung dua unsur, yaitu unsur operasional (rutin) dan unsur peningkatan kualitas. Pada tingkat unit akademik di sekolah, proses perencanaan peningkatan kualitas berdasar pada visi sekolah sebagai situasi masa depan yang hendak diwujudkan melalui analisis terhadap situasi lingkungan (*environmental scanning*) untuk cakrawala waktu 10 tahun ke depan. Melalui *environtal scanning* dapat dikenali situasi eksternal yang merupakan kesempatan dan yang merupakan ancaman (*threat*).

Visi sekolah hendaknya dijabarkan dalam bentuk pernyataan misi atau tugas yaitu apa tindakan yang harus dilakukan, untuk siapa dan bagaimana tindakan itu dilakukan, serta mengapa tindakan untuk mewujudkan visi itu harus dilakukan. Pernyataan misi itu ada pada tingkat program, sehingga pernyataan misi sekolah menunjukkan keunikan program yang dihasilkan oleh program sekolah tersebut. Selanjutnya pernyataan misi dijabarkan dalam

bentuk pernyataan tujuan yaitu situasi yang harus dicapai sebagai indikator keterlaksanaan misi dalam rangka mewujudkan visi.

Secara umum kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan di sekolah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Penjaminan mutu didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang bersifat umum, terbuka dan obyektif, yang dirumuskan berdasarkan pernyataan-pernyataan tujuan, yang dijadikan sebagai alat penilaian kualitas pendidikan di sekolah. 2) Penjaminan mutu dilakukan melalui proses yang transparan dan interaktif melalui penilaian diri dan inspeksi penjaminan mutu. 3) Penjaminan mutu dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan berbagai aktivitas dalam proses penjaminan mutu dan manajemen berbasis sekolah, serta nilai-nilai tradisional dan kebutuhan-kebutuhan sekolah untuk berubah. 4) Penjaminan mutu dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan antara dukungan kepada sekolah melalui kemitraan dan tekanan kepada sekolah melalui monitoring. 5) Tujuan Penjaminan mutu adalah untuk mencapai mutu pendidikan sekolah melalui pengembangan dan akuntabilitas.



Gambar 1. Materi Workshop SPMP

Kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan di Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang menjadi dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan visi dan misi Sekolah Dasar masing-masing.

Indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang

dilakukan dalam proses penjaminan mutu meliputi 4 ranah, yaitu : 1) Manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek-aspek kepemimpinan, perencanaan dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya, sumber daya dan pemeliharannya, dan evaluasi diri. 2) Pembelajaran, yang meliputi aspek-aspek kurikulum, pengajaran, proses belajar siswa, dan penilaian. 3) Dukungan kepada siswa dan etos sekolah yang meliputi aspek-aspek bimbingan, pengembangan pribadi dan sosial siswa, dukungan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orang tua dan masyarakat, dan iklim sekolah. 4) Prestasi belajar, yang meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis.

Banyak indikator yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penjaminan mutu di Sekolah Dasar Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.. Penjaminan mutu di SD misalnya dalam hal kurikulum, fasilitas dan proses pembelajaran. Indikator-indikator yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti: penyiapan silabus, penyiapan bahan ajar, penyiapan bahan/pedoman praktek, alat/media pembelajaran, dan alat evaluasi.

Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan modern yang dikembangkan untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seseorang. Dalam konteks ini, sekolah diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Dalam perkembangannya, fungsi sekolah dan kompetensi (kemampuan) lulusan yang dihasilkannya dipersepsi dan dipahami secara beragam oleh berbagai pihak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini dapat berlangsung secara baik, lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari para peserta workshop tentang sistem penjaminan mutu ini. Disamping itu juga tampak dari respon yang sangat positif dari peserta workshop ini sejak dari peninjauan untuk dilakukannya kegiatan

ini sampai dengan pelaksanaan workshop ini. Pada saat workshop kesungguhan mengikuti kegiatan ini tampak tinggi, yang hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang ikut dalam kegiatan ini, dan juga banyaknya pertanyaan dan permasalahan yang dilontarkan pada saat workshop. Kesungguhan peserta juga tampak pada saat workshop menyusun indikator dan program sekolah bermutu. Peserta workshop sangat mengharapkan kegiatan semacam ini terus dilakukan pada saat-saat yang akan datang.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa program pengabdian kepada masyarakat ini dapat berlangsung dengan lancar serta mendapatkan respon positif. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang mendukung, seperti kemauan dari para peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya cukup tinggi. Namun demikian, hasil dari workshop ini tampaknya belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh peserta mengingat kondisi sekolah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan sistem penjaminan mutu sekolah dipandang relatif baru untuk diterapkan sehingga masih pada taraf perintisan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Sistem penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu berkelanjutan di sekolah. Seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah menjadi fokus dari upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu sekolah. 2) Sistem penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang memiliki kompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang memadai termasuk praktisi pendidikan dari LPMP atau perguruan tinggi. Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan efisien akan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas dan aksesibilitas data untuk tujuan penjaminan dan peningkatan mutu. 3) Kepala

sekolah dan guru, dengan dukungan dari pengawas, memegang tanggung jawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan, dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah kegiatan utama untuk mendorong peningkatan kinerja sekolah, pengembangan profesi guru dan peningkatan hasil belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2000). "Sistem Penjaminan Mutu dalam Manajemen Mutu Pendidikan", *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 1 Tahun XIX: 28-30
- Department for Education and Children Service. (1996). "Quality Assurance Framework in School: Guidelines for Implementation", Adelaide: Quality Assurance Unit.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program Percepatan Pembangunan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Mendiknas no.07 tahun 2007 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Tim Pengembang Penjaminan Mutu Sekolah (2003). *Konsep Dasar Program Penjaminan Mutu Sekolah. Lembaga Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)